

Kain Sebagai *Pasĕk-Pasĕk* dalam Upacara Penetapan *Sĭma* Masa Mpu Siᅇdok: Korelasi Jenis Kain dan Kedudukan Penerimaanya

Siti Nur Anisa

Museum Ullen Sentalu

Corresponding author: nisa.sna1109@gmail.com

ABSTRACT

The type and quantity item as *pasĕk-pasĕk* received in the *sĭma* establishing ceremony is different each receiver. This diversity is determined by the recipient's position. Cloth and money are commonly used as *pasĕk-pasĕk*. A person's social status can be known based on the type of cloth they wear. This research aims to mapping the distribution of cloth as *pasĕk-pasĕk*, reconstructing the correlation between individual position and the types of cloth received in the *sĭma* ceremony, and reconstructing the ranking of cloth based the exclusivity of its ownership. The study uses inductive reasoning. The observation is focused on the type of *wĕihan* cloth mentioned in Mpu Siᅇdok's inscription and position of the individual recipients. This study shows that each type of cloth has its own distribution scope related to the hierarchy of government official: central level, *watak* and *wanua*. *Wĕihan gaᅇjar haji* and *wĕihan bwat kliᅇ* are the type of cloth with the highest social value because they are only intended for *Śrĭ Mahārāja*.

Keywords: Cloth; *pasĕk-pasĕk*; *sĭma*; Mpu Siᅇdok

ABSTRAK

Jenis serta jumlah barang sebagai *pasĕk-pasĕk* yang diterima dalam upacara *sĭma* berbeda tiap penerimaanya. Keberagaman tersebut ditentukan berdasarkan kedudukan penerima. Kain dan uang umum dijadikan sebagai *pasĕk-pasĕk*. Status sosial seseorang dapat diketahui berdasarkan jenis kain yang dipakainya. Penelitian ini bertujuan memetakan distribusi kain sebagai *pasĕk-pasĕk*, rekonstruksi korelasi jabatan individu dan jenis kain yang penerimaanya dalam upacara *sĭma*, serta membuat rekonstruksi pemeringkatan kain berdasarkan eksklusifitas kepemilikannya. Penelitian menggunakan penalaran induktif. Pengamatan difokuskan pada penyebutan jenis kain *wĕihan* dan jabatan dari individu penerimaanya yang disebutkan dalam prasasti masa pemerintahan Mpu Siᅇdok. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tiap-tiap jenis kain memiliki ruang lingkup distribusi tersendiri terkait dengan penjenjangan pejabat pemerintahan: tingkat pusat, *watak*, dan *wanua*. Kain jenis *wĕihan gaᅇjar haji* dan *wĕihan bwat kliᅇ* merupakan kain dengan nilai sosial tertinggi sebab hanya diperuntukan bagi *Śrĭ Mahārāja*.

Kata Kunci: kain; *pasĕk-pasĕk*; *sĭma*; Mpu Siᅇdok.

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat masa lampau dapat ditelusuri dari berbagai benda yang ditinggalkannya. Berbagai benda tinggalan masa lampau tersebut dapat mencerminkan tingkat perkembangan kehidupan budaya masyarakat pendukungnya. Salah satu tinggalan kebudayaan dari masa lampau adalah prasasti. Masyarakat yang hidup sezaman dengan prasasti telah mengenal budaya tulis-menulis. Berdasarkan informasi yang termuat dalam prasasti, dapat diketahui berbagai aspek kehidupan masyarakat pendukungnya, misalkan kehidupan religi, sosial, dan budaya.

Sebagian besar prasasti yang telah ditemukan dan dikaji di Indonesia memuat informasi tentang upacara penetapan tanah *sīma*. Tanah *sīma* merupakan sebidang tanah yang bersifat *swatantra* atau bebas pungutan pajak, yaitu dapat berupa sawah, kebun, maupun hutan (Haryono, 1980). Bagi masyarakat Jawa kuno, upacara penetapan tanah *sīma* merupakan kegiatan yang sakral. Upacara penetapan tanah *sīma* sendiri terdiri atas berbagai rangkaian acara, meskipun tidak selalu sama penyebutan tahapannya pada tiap-tiap prasasti. Meskipun demikian, secara garis besar tahap-tahap kegiatan yang dilakukan cukup serupa. Tahapan kegiatan pada upacara penetapan *sīma* salah satunya adalah pembagian *pasěk-pasěk* kepada hadirin.

Pasěk-pasěk merupakan berbagai barang yang diberikan penerima hak *sīma* kepada tamu undangan dalam upacara penetapan tanah *sīma* sebagai hadiah. Para tamu undangan ini terdiri atas pejabat-pejabat pemerintahan serta masyarakat desa dari wilayah yang tanahnya ditetapkan sebagai tanah *sīma* yang berperan sebagai saksi dalam upacara penetapan tersebut. Jumlah dan jenis *pasěk-pasěk* yang diterima setiap individu berbeda sesuai kedudukan atau tingkat jabatan individu penerimanya (Fitriati, 1987; Boechari, 2012). *Pasěk-pasěk* dapat terdiri atas berbagai jenis barang yang umumnya berupa uang dan kain. *Pasěk-pasěk* kain dapat berupa *wđihan* untuk laki-laki (Wurjantoro, 1986) dan *ken* untuk perempuan (Purnomo, et al, 2022) adapun penelitian ini akan difokuskan pada kain jenis *wđihan*. *Pasěk-pasěk* berupa kain diberikan dalam satuan *yugala* (dapat pula disingkat *yu* atau *yuga*) dan *hle*, sedangkan *pasěk-pasěk* berupa uang emas diberikan dalam satuan *masa* dan *suwarna* (Haryono, 1999).

Hal yang sekiranya perlu diingat adalah bahwa topik penelitian tentang kain pada masyarakat Jawa kuno telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu.

Diantaranya ada Wuryantoro (1986), Fitriati (1987), Aswoto (1994), Noerhadi (2012), Saputri (2017), dan Maziyah (2022). Dengan demikian, maka penelitian ini bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu dengan topik serupa dengan menyajikan beberapa kebaruan dalam membedah penyebutan kain di prasasti dan pejabat yang menerimanya.

Penggunaan kain terkait jenis dan motif bagi masyarakat Jawa kuno berkaitan erat dengan status sosial penggunaannya (Wuryantoro, 1986; Aswoto, 1994; Noerhadi, 2012; Maziyah, 2022). Dengan kata lain, jenis atau motif kain dapat menjadi penanda status sosial dari individu yang menggunakannya. Adapun penelitian ini akan difokuskan pada pemetaan berbagai jenis kain berupa *wᅇdihan* yang diberikan sebagai *pasėk-pasėk* dalam upacara penetapan *sīma* dengan melihat kedudukan atau jabatan penerimanya pada sistem stratifikasi birokrasi pemerintahan. Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan pernyataan bahwa kain berfungsi sebagai penanda status sosial seseorang. Beberapa peneliti terdahulu telah menyatakan bahwa kain bagi masyarakat Jawa kuno berkorelasi dengan status sosial pemakai atau pemiliknya (Wuryantoro, 1986; Aswoto, 1994; Noerhadi, 2012; Maziyah, 2022) sehingga penelitian ini mampu mempertajam konsep stratifikasi pejabat yang dapat direkonstruksi dari sumber prasasti guna melanjutkan penelitian sebelumnya. Stratifikasi sosial muncul dalam kondisi salah satu individu memiliki kualitas diri yang lebih unggul dari individu-individu lain dalam kelompok masyarakatnya (Johnson, 2013). Penelitian ini melihat lebih jauh model stratifikasi pejabat birokrasi pemerintahan yang ada di era Mpu Siᅇdok.

Penggunaan prasasti dari masa Mpu Siᅇdok dipilih karena prasasti-prasasti tersebut memuat data yang diperlukan untuk penelitian, berupa nama-nama kain yang diberikan sebagai *pasėk-pasėk* dan jabatan individu penerimanya. Selain itu, masa kekuasaan Mpu Siᅇdok juga menandai tonggak awal kehidupan masyarakat Jawa kuno saat itu. Masa ini dalam sejarah Indonesia kuno adalah era pascapemindahan ibu kota kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur seperti yang tertulis pada Prasasti Turyyān 851 Śaka (Poesponegoro dan Notosusanto, 2009). Mpu Siᅇdok juga diketahui sebagai sosok dibalik pendirian dinasti baru, yaitu Dinasti Isyana sebagaimana tertulis pada Prasasti Pucangan (Poesponegoro dan Notosusanto, 2009). Hal tersebut menjadi indikasi bahwa kehidupan era kepemimpinan Mpu Siᅇdok



telah mumpuni sehingga mampu melakukan perubahan-perubahan yang cukup besar.

Berdasarkan uraian permasalahan, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian 1) bagaimana distribusi kain *wḍihan* sebagai *pasěk-pasěk* jika dikaitkan dengan kedudukan sosial-politik penerimanya berdasarkan prasasti Mpu Siṅḍok? dan 2) bagaimana klasifikasi atau pemeringkatan jenis kain *wḍihan* yang didistribusikan sebagai *pasěk-pasěk* dalam upacara *sīma* masa Mpu Siṅḍok? Adapun, penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kedudukan sosial-politik seseorang dengan jenis kain berupa *wḍihan* sebagai *pasěk-pasěk* yang diterimanya dalam upacara penetapan *sīma*. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola persebaran kepemilikan terhadap berbagai jenis kain berdasarkan pembagian pejabat pemerintahan pada sistem stratifikasi birokrasi politik. Penelitian ini membuat rekonstruksi pemeringkatan kain berdasarkan eksklusifitas kepemilikan suatu jenis kain. Hal ini penting untuk memperkuat peneliti terdahulu yang telah menyatakan bahwa kain bagi masyarakat Jawa kuno berkorelasi dengan status sosial pemakai atau pemiliknya (Wuryantoro, 1986; Aswoto, 1994; Noerhadi, 2012; Maziyah, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan penalaran induktif. Penelitian dilakukan dengan mengamati dan memetakan data persebaran jenis-jenis kain sebagai *pasěk-pasěk* pada sampel prasasti yang digunakan. Pengamatan difokuskan pada jenis kain yang diberikan dan jabatan penerima. Proses penelitian terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap interpretasi.

Pertama, tahap pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Mpu Siṅḍok. Pada tahap ini disusun batasan ruang lingkup penelitian yang digunakan untuk menentukan pemilihan terhadap prasasti-prasasti yang digunakan sebagai sampel penelitian. Adapun ruang lingkup data pada penelitian ini terdiri atas tiga hal, yaitu prasasti yang berisi penetapan *sīma* era Mpu Siṅḍok, prasasti memuat *pasěk-pasěk* berupa kain, dan prasasti bukan merupakan tinulad. Dari total 28 buah prasasti yang dibuat dari era Mpu Siṅḍok, hanya ada 12 buah prasasti yang memenuhi kriteria dari ruang lingkup penelitian yang telah ditentukan. Namun demikian, hanya 10 prasasti saja yang dapat direkonstruksi pola distribusi kainnya, sebab 2 prasasti lainnya sudah sangat aus sehingga sulit untuk dilakukan pengidentifikasian *pasěk-pasěk* berupa

kain. Adapun secara rinci, prasasti-prasasti yang digunakan pada penelitian ini, yaitu Prasasti Linggasuntan (851 Śaka), Prasasti Gulung-gulung (851 Śaka), Prasasti Turyyān (851 Śaka), Prasasti Sarangan (851 Śaka), Prasasti Jĕru-Jĕru (852 Śaka), Prasasti Gemekan (852 Śaka), Prasasti Hĕring (856 Śaka), Prasasti Añjuklaᅇang (859 Śaka), Prasasti Alasantan (861 Śaka), serta Prasasti Kampak (angka tahun tidak dapat diidentifikasi). Tahap kedua, analisis diawali dengan indentifikasi nama jabatan, nama jenis kain, dan satuan yang diterima dari 10 prasasti yang sesuai kriteria. Selanjutnya, dilakukan pengelompokan berdasarkan kesamaan jenis kain. Dicantumkan pula satuan kain yang diterima pada tiap-tiap prasasti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data persebaran kain berdasarkan jabatan penerimanya. Selanjutnya dilakukan pemeringkatan atau klasifikasi kain menjadi tiga kelas, yaitu kain eksklusif, kain menengah, dan kain biasa. Pemeringkatan kain ini didasarkan pada kepemilikan suatu jenis kain yang dikaitkan dengan kedudukan atau jabatan dari individu penerima jenis kain. Tahap ketiga, interpretasi dilakukan dengan menerapkan konsep stratifikasi sosial untuk menjelaskan ruang lingkup persebaran jenis-jenis kain tersebut berdasarkan tingkat jabatan atau kedudukan sosial-politik penerimanya berdasarkan hasil pengolahan data pada tahap analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepedulian Eksistensi kain telah ada sejak ratusan tahun lalu, salah satu buktinya adalah penyebutan keberadaan kain sebagai *pasĕk-pasĕk* dalam upacara penetapan tanah *sĭma* yang terpahatkan dalam prasasti. Kain pada prasasti sendiri disebutkan dengan istilah *wᅇihan* yang diperuntukan bagi laki-laki dan *ken* yang diberikan untuk perempuan. Masing-masing jenis kain sebagai *pasĕk-pasĕk* memiliki distribusi atau persebaran tersendiri. Distribusi atau persebaran yang dimaksud berkaitan dengan tingkat jabatan atau kedudukan sosial-politik dari individu penerima kain pada sistem stratifikasi birokrasi pemerintahan.

Pejabat birokrasi pemerintahan dari tertinggi hingga terendah pada masyarakat Jawa kuno dapat dibagi atas pejabat tingkat pusat, pejabat tingkat *watak*, dan pejabat tingkat *wanua* (Maziyah, 2010). Penguasa tertinggi disebut sebagai *Śri Maharājā*. Dalam kepemimpinannya, seorang *Śri Maharājā* akan dibantu oleh pejabat tingkat pusat. Pejabat di tingkat pusat dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pejabat pusat golongan satu sebagai kelompok penerima perintah raja dan pejabat pusat golongan dua yang bertugas untuk melaksanakan perintah raja. Pejabat pusat tingkat satu



terdiri atas *rakryān mahamantri katrini*, *rakai wka*, dan *samgat tiruan* (Ida, 1995; Firdatama, 2017). *Rakryān mahamantri katrini* yang terdiri atas *rakai hino*, *rakai halu*, dan *rakai sirikan*, serta *rakai wka* dijabat oleh kerabat dekat raja baik anak-anak raja, adik, paman, atau kemenakan. Di antara para *rakai* lainnya dalam jajaran *rakryān mahamantri katrini*, *rakai hino* menempati posisi tertinggi sebagai putra mahkota.

Rakai kanuruhan, *samgat momahumah kalih*, *samgat halaran*, *samgat manghuri*, *samgat tilimpik*, *samgat dalinan*, *samgat wadihati*, *samgat makudur*, *pangkur*, *tawan* dan *tirip* masuk dalam kelompok pejabat pusat golongan dua. *Samgat wadihati* dan *samgat makudur* merupakan pejabat di bidang keagamaan yang secara khusus bertugas dalam menangani upacara penetapan *sīma*. *Samgat wadihati* memiliki bawahan dengan nama *tuhan i miramiraḥ* dan *tuhan i halaran*, sedangkan *watu walaiñ* dan *watu kiluñ* adalah pejabat bawahan dari *samgat makudur*. Pejabat pusat golongan dua lainnya dengan tugas yang telah diketahui misalnya pejabat *pañkur*, *tawan*, serta *tirip* sebagai pejabat pengelola pendapatan kerajaan dari hasil penarikan pajak. Para pejabat tingkat pusat masing-masing memiliki tanah lungguh yang menjadi daerah kekuasaannya, kecuali pejabat *pañkur*, *tawan* dan *tirip*. Ketiga pejabat tersebut masuk dalam kelompok *mañilala drawya haji* yang mendapatkan gaji tetap dari kerajaan.

Wilayah di bawah pemerintahan pusat, wilayah *watak*, dipimpin oleh seorang *rakai* yang diambil dari seorang pejabat di tingkat pusat. Pejabat pada tingkat *watak* setidaknya terdiri atas pejabat *parujar*, *citralekha*, *pituñtuñ*, dan *pañurañ* yang berperan sebagai bawahan seorang *rakai* sebagai pemimpin wilayah *watak* tersebut (Poesponegoro dan Notosusanto, 2009). *Parujar* dan *pituñtuñ* berperan sebagai juru bicara. Juru tulis ditugaskan kepada *citralekha*. Pengelolaan pajak menjadi tugas seorang *pañurañ*. Beberapa pejabat lain di tingkat *watak* terdiri atas *wahuta*, *matanda*, *pratyaya*, *tuñgu duruñ*, *hulu kuwu*, dan *patih* atau *piñhe* (Ida, 1995). *Patih* ini terdiri atas *patih juru*, *patih lampuran*, *patih kahyunan*, *patih pamgat*, *patih mangharap*, serta *patih tugaran* (Firdatama, 2017).

Pada wilayah tingkat terendah, yaitu *wanua*, pejabat birokrasi diisi oleh *rama*, *gusti*, *winkas*, *para tuhā*, dan *para hulu* (Boechari, 2012). Pejabat *tuhā* misalnya terdiri dari *tuhā banua*, *tuhālas*, serta *tuhā gusali*. Pejabat *hulu* misalnya *hulu wras*, *hulu wuatan*, dan *hulu turus* dengan tugas secara berurutan pengelola hasil panen, pengawas jembatan, dan pengelola batas tanah.

Para pejabat birokrasi pemerintahan yang telah dijabarkan adalah individu-individu yang dalam prasasti *sīma* menjadi para penerima berbagai barang yang dijadikan sebagai *pasėk-pasėk*. *Pasėk-pasėk* diberikan dalam jumlah dan jenis yang bervariasi berdasarkan tinggi-rendah kedudukan atau jabatan penerimanya (Fitriati, 1987; Dwiyanto. et al, 2016). Berdasarkan pengolahan terhadap sampel prasasti, data yang didapatkan menunjukkan kecenderungan bahwa pejabat dari tingkat jabatan yang sama akan memperoleh *pasėk-pasėk* yang serupa terkait dengan jenis dan jumlah satuan barang yang diberikan.

Berdasarkan pendataan nama-nama jenis kain dari prasasti *sīma* era Mpu Siᅇdok, dapat diketahui setidaknya pada masa tersebut telah dikenal 12 jenis kain yaitu *wᅇihan gaᅇjar haji*, *wᅇihan bwat kliᅇ*, *wᅇihan tapiś*, *wᅇihan tapiś cadar*, *wᅇihan jaro haji*, *siᅇhᅇl*, *wᅇihan cadar*, *wᅇihan ragi*, *wᅇihan padi*, *ken bwat lor*, *ken*, dan *wᅇihan*. Adapun, pola distribusi jenis-jenis kain yang ada sekiranya selaras dengan pembagian pejabat pemerintahan secara berjenjang pada sistem birokrasi pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi kain sebagai *pasėk-pasėk* Prasasti masa Mpu Siᅇdok

No	Prasasti	Tahun (Śaka)	Jenis Pasėk Kain	Satuan	Kedudukan Pejabat Penerima
1.	Linggasuntan	851	<i>wᅇihan tapiś</i>	pasang	Śri Mahārāja
			<i>wᅇihan cadar</i>	helai	Pusat golongan 1
					Pusat golongan 2
					Tingkat Watak
			<i>wᅇihan ragi</i>	pasang	Tingkat Watak
			<i>wᅇihan</i>	pasang	Tingkat Watak
					Tingkat Wanua
				helai	Tingkat Watak
	Tingkat Wanua				
2.	Gulung-gulung	851	<i>wᅇihan tapiś cadar</i>	pasang	Śri Mahārāja
					Pusat golongan 1
					Pusat golongan 2
			<i>wᅇihan ragi</i>	pasang	Pusat golongan 2
				helai	Tingkat Watak
			<i>siᅇhᅇl</i>	pasang	Pusat golongan 2
			<i>wᅇihan padi</i>	helai	Taᅇᅇ Rakryān
			<i>wᅇihan</i>	pasang	Tingkat Watak
				helai	Tingkat Watak
				helai	Tingkat Watak
<i>ken</i>	helai	Tingkat Watak			



3.	Turyyān	851	<i>wḍihan bwat kliḥ</i>	pasang	<i>Śri Mahārāja</i>
			<i>wḍihan</i>	pasang	Pusat golongan 1
					Pusat golongan 2
					Tingkat Watak
	helai	Tingkat Wanua			
4.	Sarangan	851	<i>wḍihan tapis</i>	helai	Pusat golongan 1
					Pusat golongan 2
			<i>wḍihan</i>	pasang	Pusat golongan 2
					Tingkat Watak
				helai	Tingkat Watak
					Tingkat Wanua
	<i>ken bwat lor</i>	helai	Istri Pejabat		
5.	Jēru-ēru	852	<i>wḍihan tapis cadar</i>	pasang	<i>Śri Mahārāja</i>
					Pusat golongan 1
					Pusat golongan 2
			<i>wḍihan raji</i>	pasang	Pusat golongan 2
					Tingkat Watak
				helai	Tingkat Watak
			<i>ken</i>	helai	Penduduk Wanua
			<i>wḍihan padi</i>	helai	Taṇḍa Rakryān
					Tidak diketahui
			<i>wḍihan</i>	pasang	Tingkat Watak
	Tingkat Wanua				
	helai	Tingkat Watak			
		Tingkat Wanua			
6.	Gemekan	852	<i>wḍihan tapis</i>	pasang	<i>Śri Mahārāja</i>
					Pusat golongan 1
					Pusat golongan 2
			<i>wḍihan cadar</i>	pasang	Pusat golongan 2
					Tingkat Watak
	helai	Tingkat Watak			
<i>wḍihan raji</i>	helai	Tingkat Watak			
		Tingkat Wanua			
7.	Hëring	856	<i>wḍihan</i>	pasang	<i>Śri Mahārāja</i>
					Pusat golongan 1
					Pusat golongan 2
	helai	Tingkat Watak			
8.	Añjukladang	859	<i>wḍihan gañjar haji</i>	pasang	<i>Śri Mahārāja</i>
			<i>wḍihan</i>	pasang	Pusat golongan 1
					Pusat golongan 2
					Tingkat Watak
	helai	Tidak diketahui			

9.	Ālasantan	861	<i>wᄁihan gañjar haji</i>	pasang	Śri Mahārāja
			<i>wᄁihan jaro haji</i>	pasang	Pusat golongan 1
				helai	Rakryān wulat patih
			<i>wᄁihan</i>	pasang	Pusat golongan 1
					Pusat golongan 2
				helai	Tingkat Watak
		Tidak diketahui			
10.	Kampak	-	<i>wᄁihan tapis</i>	pasang	Śri Mahārāja
			<i>wᄁihan cadar</i>	pasang	Pusat golongan 1
					Pusat golongan 2

Sumber: Hasil Analisis

Wᄁihan gañjar haji dan *wᄁihan bwat kliᅇ* adalah jenis kain khusus yang hanya diberikan untuk seorang Śri Maharājā. Menurut Maziyah (2019), *wᄁihan bwat kliᅇ* merupakan kain impor dari India Selatan. Selain dua jenis kain tersebut seorang Śri Maharājā dapat pula memperoleh kain dari jenis *wᄁihan tapis* dan *wᄁihan tapis cadar*. Adapun, *wᄁihan tapis* dan *wᄁihan tapis cadar* selain diberikan kepada Śri Maharājā juga dapat diberikan kepada pejabat-pejabat di tingkat pusat misalnya *rakai sirikan*, *rakai wka*, *tiruan*, *maᄁaᅇᄁēr* dan *aᅇgᅇhan*. Mengingat *rakai sirikan* dan *rakai wka* adalah jabatan yang diduduki oleh kerabat dekat atau keluarga Śri Maharājā maka wajar mereka berkesempatan mendapatkan kain dari jenis yang sama dengan yang diterima oleh Śri Maharājā.

Para pejabat di tiga tingkat jabatan di bawah Śri Maharājā secara berurutan akan mendapatkan kain dari jenis *wᄁihan jaro haji*, *wᄁihan tapis*, *wᄁihan tapis cadar*, *wᄁihan cadar*, dan *wᄁihan* untuk pejabat pusat golongan satu. Adapun, untuk pejabat tingkat pusat golongan dua jenis-jenis kain yang diberikan meliputi *wᄁihan tapis*, *wᄁihan cadar*, *wᄁihan tapis cadar*, *wᄁihan ragi*, *siᅇhᅇl*, dan *wᄁihan*. Pejabat di tingkat yang lebih rendah yaitu watak, kain-kain yang diberikan meliputi jenis kain *wᄁihan tapis*, *wᄁihan cadar*, *wᄁihan ragi*, dan *wᄁihan*. Pejabat di tingkat terendah yaitu *wanua* mendapatkan kain jenis *wᄁihan ragi* dan *wᄁihan*.

Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa semakin tinggi kedudukan atau jabatan seorang individu menyebabkan individu tersebut berkesempatan memperoleh kain dengan jenis yang lebih bervariasi. Pejabat tingkat pusat golongan satu berhak mendapat setidaknya lima jenis kain yaitu *wᄁihan tapis*, *wᄁihan tapis cadar*, *wᄁihan jaro haji*, *wᄁihan cadar*, dan *wᄁihan*. Pejabat tingkat watak hanya berkesempatan memperoleh tiga jenis kain saja yang terdiri atas kain jenis *wᄁihan cadar*, *wᄁihan ragi*



dan *wḍihan*. Suatu jenis kain nampaknya juga hanya diperuntukkan bagi kelompok jabatan tertentu saja. Sebagai contoh, *wḍihan jaro haji* hanya dapat dimiliki oleh pejabat tingkat pusat golongan satu, dengan demikian pejabat dari tingkat yang lebih rendah tidak berkesempatan menerima kain jenis ini.

Pada tabel tampak juga jika kain jenis *wḍihan* diberikan dalam jumlah dan jenis yang lebih banyak dibandingkan *ken*, terdapat setidaknya sembilan jenis *wḍihan* dan hanya dua jenis *ken* saja. Selain itu, *ken* juga tidak diberikan kepada pejabat pemerintahan melainkan hanya diberikan kepada istri dari para pejabat di tingkat watak dan wanua. Mengingat pernyataan Wurjantoro (1986) bahwa *wḍihan* adalah kain untuk laki-laki, hal ini mengindikasikan bahwa para pejabat pemerintahan di era Mpu Sindok adalah para laki-laki.

Jenis-jenis kain yang diberikan pada tiap-tiap upacara penetapan tidak selalu sama. Hal ini mungkin berkaitan dengan jenis tanah *sīma* yang diresmikan serta kemampuan dalam hal pembiayaan upacara. *Śrī Mahārāja* pada Prasasti Turyyān (851 Śaka) dengan jenis tanah *sīma anugraha* memperoleh kain jenis *wḍihan bwat kliṅ* yang merupakan sebuah kain impor dari wilayah India. Pada Prasasti Gulung-gulung (851 Śaka) dan Prasasti Jĕru-jĕru (852 Śaka) dari jenis tanah *sīma manambah*, *Śrī Mahārāja* memperoleh kain jenis *wḍihan tapiś cadar*. Fenomena tersebut terjadi karena perbedaan status tanah *sīma*. *Sīma anugraha* merupakan tanah *sīma* yang ditetapkan karena anugrah atau perintah raja, sedangkan tanah *sīma manambah* adalah tanah *sīma* yang ditetapkan karena adanya permohonan yang diajukan kepada raja (Suhadi, 1993).

Variasi jumlah dari jenis kain yang digunakan sebagai *pasĕk-pasĕk* dalam suatu upacara *sīma* pun beragam. Terdapat satu upacara *sīma* yang menggunakan berbagai jenis kain misalnya upacara *sīma* pada Prasasti Linggasuntan (851 Śaka) yang menggunakan empat jenis kain yaitu *wḍihan tapiś cadar*, *wḍihan ragi*, *wḍihan cadar* dan *wḍihan*. Prasasti Turyyān (851 Śaka) hanya menggunakan dua jenis kain saja yaitu *wḍihan bwat kliṅ* dan *wḍihan*. Fenomena ini nampaknya berkorelasi dengan kemampuan pembiayaan upacara. *Wḍihan bwat kliṅ* diketahui sebagai kain impor dari India, sehingga kain ini memiliki harga jual yang mahal. Oleh sebab itu, anggaran biaya upacara pada prasasti Turyyān (851 Śaka) terpakai cukup banyak untuk penyediaan kain jenis *wḍihan bwat kliṅ* yang dijadikan sebagai *pasĕk-pasĕk* untuk *Śrī*

Mahārāja. Dampaknya, pejabat-pejabat lain hanya mendapatkan kain jenis *wđihan* biasa.

Berdasarkan pemetaan distribusi kain sebagai *pasėk-pasėk* seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1, lebih lanjut dilakukan pemeringkatan jenis-jenis kain terkait eksklusivitas distribusi masing-masing jenis kain.

Tabel 2. Distribusi jenis kain pada prasasti masa Mpu Siŋdok

No	Jenis Kain	Distribusi
1.	<i>wđihan gaŋjar haji</i>	<i>Śrġ Mahārāja</i>
2.	<i>wđihan bwat kliŋ</i>	<i>Śrġ Mahārāja</i>
3.	<i>wđihan tapis</i>	<i>Śrġ Mahārāja</i> dan pejabat tingkat pusat
4.	<i>wđihan tapis cadar</i>	<i>Śrġ Mahārāja</i> dan pejabat tingkat pusat
5.	<i>wđihan jaro haji</i>	Pejabat pusat golongan 1
6.	<i>siŋhėl</i>	Pejabat tingkat pusat golongan 2 bagian keagamaan
7.	<i>wđihan cadar</i>	Pejabat tingkat pusat, pejabat tingkat <i>watak</i> .
8.	<i>wđihan ragi</i>	Pejabat tingkat pusat golongan 2, pejabat tingkat <i>watak</i> dan pejabat tingkat <i>wanua</i>
9.	<i>wđihan padi</i>	Tingkatan pejabat penerima belum teridentifikasi
10.	<i>ken</i>	Keluarga pejabat
11.	<i>ken bwat lor</i>	Keluarga pejabat
12.	<i>wđihan</i>	Pejabat tingkat pusat, pejabat tingkat <i>watak</i> , pejabat tingkat <i>wanua</i> , rakyat.

Sumber: Hasil Analisis

Klasifikasi atau pemeringkatan pada Tabel 2 disusun dengan melihat tingkat kedudukan individu penerima suatu jenis kain tertentu pada sistem birokrasi pemerintahan yang merupakan bentuk stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial muncul di dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan sosial, yaitu kondisi terdapat salah satu individu memiliki kualitas diri yang lebih unggul dari individu-individu lain dalam kelompok masyarakatnya (Johnson, 2013). Individu tersebut nantinya mendominasi dalam kehidupan kelompoknya, serta individu tersebut berkesempatan mendapatkan lebih banyak hak-hak istimewa dibandingkan individu-individu lainnya. Keberadaan suatu sistem stratifikasi sosial dalam kelompok masyarakat merupakan keharusan bagi keberlanjutan kehidupan bermasyarakat (Soekanto, 2014). Stratifikasi sosial dapat terbentuk melalui dua cara, yaitu secara alami dan buatan. Stratifikasi sosial alami terbentuk berdasarkan senioritas berdasarkan tingkat usia, garis keturunan, dan kekayaan. Stratifikasi sosial buatan



dibentuk secara sengaja guna mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya pembentukan pejabat-pejabat birokrasi untuk pembagian tugas kerja, kekuasaan dan wewenang.

Dua jenis kain yang hanya diberikan untuk *Śri Maharājā* digolongkan sebagai kain dari kelas eksklusif yaitu *wḍihan gañjar haji* dan *wḍihan bwat klin̄*. *Wḍihan bwat klin̄* diasumsikan sebagai kain impor dari India dengan adanya kata *klin̄* yang merujuk pada Kalingga suatu tempat di India selatan (Maziyah, 2019). *Wḍihan tapis cadar*, *wḍihan tapis*, *wḍihan jaro haji*, dan *siñhēl* masuk dalam kain kelas kedua atau menengah. Hal tersebut disebabkan oleh distribusi jenis-jenis kain yang beredar di kalangan para pejabat tingkat pusat. Kain kelas ketiga atau kain biasa meliputi *wḍihan cadar*, *wḍihan ragi*, *wḍihan padi*, serta *wḍihan*. Kain-kain dari kelas biasa ini memiliki distribusi yang tidak eksklusif, yaitu dapat beredar dari pejabat pusat, *watak*, sampai *wanua*.

Kecenderungan aturan pemakaian suatu jenis kain untuk jabatan politik atau kedudukan sosial tertentu nampaknya masih dapat dijumpai pada kehidupan masyarakat saat ini. Aturan pembatasan penggunaan jenis kain tertentu berdasarkan kedudukan sosial dapat dijumpai dalam kehidupan keluarga Keraton Yogyakarta. Pada kalangan bangsawan Keraton Yogyakarta dikenal adanya jenis-jenis batik larangan (Chairiyani, 2014). Batik larangan tersebut meliputi jenis *parang rusak barong*, *parang rusak gendreh*, *parang rusak klitik*, *semen gedhe sawat garuda*, *semen gedhe sawat lar*, *udan iris*, *rujak senthe*, *parang-parangan*, *cemukiran*, *kawung*, dan *huk*.

Batik larangan jenis *parang rusak* pemakaiannya terbatas untuk raja, permaisuri, dan putra mahkota. Secara lebih detail raja menggunakan *parang rusak barong*, permaisuri menggunakan *parang rusak gendreh*, dan putra mahkota menggunakan *parang rusak klitik* (Chairiyani, 2014). Berdasarkan aturan tersebut, *parang rusak barong* adalah jenis batik larangan paling eksklusif sebab hanya diperuntukkan bagi seorang raja. Kain dengan peringkat di bawah *parang rusak barong* secara berurutan diisi oleh *parang rusak gendreh* dan *parang rusak klitik*. Adanya aturan pembatasan pemakaian kain berdasarkan kedudukan sosial tersebut pada akhirnya dapat mendukung upaya rekonstruksi pemeringkatan kain pada masa Jawa kuno.

KESIMPULAN

Para peneliti terdahulu menyatakan bahwa bagi masyarakat Jawa kuno status sosial seseorang dapat diketahui dari jenis kain yang digunakannya. Lebih lanjut, para pejabat akan menerima *pasěk-pasěk* sesuai dengan tingkat kedudukannya. Penelitian ini mampu menjelaskan lebih lanjut persebaran kepemilikan suatu jenis kain berdasarkan jabatan sosial-politik era Jawa kuno dengan data prasasti *sīma* masa Mpu Siṅḍok. Penelitian ini melihat bahwa para pejabat tingkat pusat setidaknya berkesempatan mendapatkan 7 jenis kain. Sedangkan, pejabat di tingkat yang lebih rendah yaitu tingkat watak berhak mendapatkan 4 jenis kain dan pejabat di tingkat wanua berhak mendapatkan 2 jenis kain saja. Hal ini menunjukkan pendistribusian jenis kain sebagai *pasěk-pasěk* disesuaikan dengan tingkat jabatan politik atau kedudukan sosial dari individu penerimanya. Selain itu, semakin tinggi tingkat jabatan seorang individu pada sistem birokrasi pemerintahan menyebabkan individu tersebut berkesempatan memperoleh *pasěk-pasěk* kain dari jenis yang semakin bervariasi dan eksklusif. Jenis kain tertentu dikhususkan untuk pejabat di tingkat tertentu pula. Kain jenis *wḍihan gañjar haji* dan *wḍihan bwat klin* hanya diperuntukkan bagi *Śri Maharājā*, *wḍihan jaro haji* hanya diberikan untuk pejabat pusat tingkat satu, serta *siñhēl* hanya dijadikan *pasěk-pasěk* untuk *samgat makudur*. Jenis kain yang dibagikan kepada para pejabat lain sangat dipengaruhi dengan jenis kain yang diterima oleh *Śri Maharājā* dan kemampuan pembiayaan upacara. Terkait motif atau bahan yang digunakan oleh masing-masing jenis kain yang ada sekiranya dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Dr. Tjahjono Prasodjo, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi, sekaligus untuk saran-saran terkait proses penulisan artikel ini. Artikel ini merupakan bentuk alih wahana dan upaya penerbitan dari sebagian skripsi penulis dengan judul “Kain Sebagai *Pasěk-Pasěk* Dalam Konteks Stratifikasi Sosial Masyarakat Mataram Kuno: Kajian Terhadap Prasasti-Prasasti Siṅḍok”.

DAFTAR PUSTAKA

Aswoto. (1994). *Peranan Pakaian Pada Masyarakat Jawa Kuno: Tinjauan Berdasarkan Prasasti Abad IX-XI Masehi*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.



- Boechari. (2012). *Melacak sejarah kuno Indonesia lewat prasasti*. Jakarta: Gramedia.
- Chairiyani, R. P. (2014). Semiotika Batik Larangan di Yogyakarta. *Humaniora*, 5(2), 1177–1186. www.isi-dps.ac.id/berita/semiotika .
- Dwiyanto, D. et al. (2016). *Interpretasi Terhadap Komoditas Dalam Prasasti Jawa Kuno Abad VIII-X M: Sebuah Kajian Fungsi dan Distribusinya*. Yogyakarta: Kaliwangi.
- Firdatama, Amalia Hani. (2017). *Promosi dan Mutasi Jabatan Pada Masa Pu Sindok: Tinjauan Berdasarkan Prasasti-prasastinya*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Fitriati, Rita. (1987). *Pasak-pasak Dari Masa Balitung dan Sindok*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Haryono, Timbul. (1980). *Gambaran Tentang Upacara Penetapan Sima*. Majalah Arkeologi III. Jakarta: Fakultas Sastra UI.
- Haryono, T. (1999). *Sang Hyang Watu Tēas dan Sang Hyang Kulumpang: Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima Pada Masa Kerajaan Mataram Kuno*. *Humaniora*. No. 2. 14-21
- Johnson, L. A. (2013). Social stratification. *Biblical Theology Bulletin*, 43(3), 155–168. <https://doi.org/10.1177/0146107913493565> .
- Maziyah, Siti. (2010). *Daerah Otonom Pada Masa Kerajaan Mataram Kuno: Tinjauan Berdasarkan Kedudukan dan Fungsinya*. *Paramita*. 20(2). 117-128.
- Maziyah, Siti. (2019). *Nama Menunjukkan Asal: Studi Kasus Nama Jenis Kain Pada Prasasti dan Susastra Berbahasa Jawa Kuno*. Tulisan Pada Menggores Aksara Mengurai Kata Menafsir Makna. pp 182- 202. Yogyakarta: Departemen Arkeologi FIB UGM
- Maziyah, Siti. (2022). *Kain Di Jawa Dari Era Mataram Kuno Hingga Majapahit*. Semarang: Sinar Hidoep.
- Noerhadi, Inda Citraninda. (2012). *Busana Jawa Kuna*. Depok: Komunitas Bambu.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. dan Notosusanto, Nugroho. (2009). *Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno* (Edisi Pemutakhiran). Jakarta: Balai Pustaka.
- Purnomo, Giri, et al. (2022). *Ken Dalam Prasasti Sīma Masa Pemerintahan Kayuwani Dyah Lokapala*. *Tumotowo*. 5(1). Hal. 27-38. DOI: <https://jurnaltumotowo.kemdikbud.go.id>

- Setyorini, Ida. (1995). *Struktur Birokrasi Masa Sindok (929-948 Masehi)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhadi, M. (1993). Tanah Sima Dalam Masyarakat Majapahit. Disertai. Jakarta: Universitas Indonesia
- Wuryantoro, Edhie. (1986). *Wdihan Dalam Masyarakat Jawa Kuno*. Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV, pp. 98-101.

